

Implementation Of E-Government Through The Village Financial System Application (SISKEUDES) In Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency

Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Nabilah Maulidiyah Rohmah¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of e-Government through the Village Financial System (SISKEUDES) application in village financial management in Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results of the study indicate that: (1) in the communication indicator, the implementation of SISKEUDES has been carried out through socialization and coordination between village officials, but has not been fully optimal in conveying information comprehensively; (2) in the resource indicator, the availability of human resources and infrastructure is still limited so that it affects the optimization of application use; (3) in the disposition indicator, the attitude and commitment of implementers in supporting the implementation of SISKEUDES are quite good, but still need improvement in technical understanding; (4) in the bureaucratic structure indicator, there has been a clear division of tasks in the management of SISKEUDES, but the work mechanism and coordination between sections still need to be strengthened to be more structured and effective*

Keywords - E-Government; SISKEUDES; Policy Implementation

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada indikator komunikasi, implementasi SISKEUDES telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi antar perangkat desa, namun belum sepenuhnya optimal dalam penyampaian informasi secara menyeluruh; (2) pada indikator sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas sehingga mempengaruhi optimalisasi penggunaan aplikasi; (3) pada indikator disposisi, sikap dan komitmen pelaksana dalam mendukung implementasi SISKEUDES sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam pemahaman teknis; (4) pada indikator struktur birokrasi, telah terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan SISKEUDES, tetapi mekanisme kerja dan koordinasi antar bagian masih perlu diperkuat agar lebih terstruktur dan efektif.*

Kata Kunci - E-Government; SISKEUDES; Implementasi Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 pada tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan untuk membawa peluang besar di desa untuk mengurus manajemen mereka sendiri dan melakukan pengembangan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup komunitas desa. Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan sumber daya alam yang berbeda, terutama manajemen keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan peran penting ini, desa juga harus siap untuk menghadapi tanggung jawab utama. Oleh karena itu, penting bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana membuat keputusan dan bagaimana mengelola sumber daya, sedangkan akuntabilitas bahwa pemerintah desa memastikan bahwa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas desa dan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan sebenarnya diterapkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat.[1].

E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, transparansi, dan efisiensi administrasi pemerintahan. Sistem ini menghubungkan antara pemerintah

dengan warga, bisnis, dan antar unit pemerintah melalui aplikasi digital yang memungkinkan pengelolaan data, pelayanan, dan komunikasi secara elektronik. Dengan e-Government, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau, sehingga dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

E-Government adalah penerapan teknologi informasi untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah[2]. Kehadirannya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Di tingkat desa, unit administrasi ini memainkan peran strategis dalam pembangunan dan penyediaan layanan kepada warga. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa berada di garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan elektronik, atau e-government, dipahami sebagai konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, pemerintah mendorong penerapan e-government melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).[3]

Kebijakan SPBE bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian berbagai proses administrasi serta pelaporan, yang mencakup pengelolaan keuangan di desa. Dalam (SISKEUDES) menjadi contoh nyata penerapan SPBE. Dengan sistem yang terintegrasi secara baik, SISKEUDES dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempermudah pengawasan atas penggunaan dana desa.[4]. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga menjamin laporan keuangan diselesaikan tepat waktu, mendukung pembangunan desa yang lebih profesional dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SISKEUDES di Desa Larangan menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat membantu mengelola pemerintahan desa secara modern dan efisien.

Pengelolaan keuangan di desa mencakup serangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Namun, proses ini menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran, terbatasnya pemahaman terhadap regulasi, keterlambatan pencairan dana, organisasi administrasi yang buruk, serta transparansi dan akuntabilitas yang lemah. Pembayaran yang dilakukan secara tunai juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan menyulitkan pelacakan dana, sementara mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara pejabat desa seperti bendahara dan kepala desa belum efektif. Permasalahan lainnya adalah lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi dana desa untuk mengatasi tantangan ini.[5].

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan SISKEUDES, sebuah sistem keuangan desa elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES mendukung pencatatan transaksi keuangan, pelaporan otomatis, pemantauan anggaran, dan pencatatan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan transaksi aktual.[6]. Sistem ini membantu aparat desa dalam menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit.



Gambar 1 Fitur Siskeudes 2.0.7 2025

Sumber: BPKP, Laman SISKEUDES desa larangan 2025

Pada gambar menunjukkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) larangan. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan efisien. Aplikasi ini berfungsi mengelola seluruh siklus keuangan desa mulai dari perencanaan anggaran (APBDes), pencatatan transaksi, pengelolaan aset, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.[7]

Sejak peluncurannya awal pada tahun 2015, SISKEUDES terus mengalami pengembangan dan penyesuaian fitur memenuhi regulasi dan kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Pada periode transisi 2017-2018, aplikasi ini masih digunakan secara offline dan memerlukan pencatatan manual.[8]. namun sejak diberlakukan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018, pelaporan keuangan desa diwajibkan melalui SISKEUDES secara online mulai tahun 2019. Versi terbaru saat ini adalah 2.0.7 (rilis tahun 2025), yang membawa peningkatan signifikan dalam antarmuka pengguna, keamanan, dan integrasi sistem. Versi 2.0.7 sangat difokuskan pada kemudahan penggunaan dengan tampilan yang lebih intuitif agar operator desa yang bukan berlatar belakang akuntansi dapat mengoperasikannya dengan baik. Aplikasi ini juga dilengkapi sistem kontrol internal dan otorisasi yang ketat untuk menjaga integritas data keuangan desa. Fitur utama termasuk modul perencanaan APBDes, pencatatan transaksi lengkap, pelaporan realisasi anggaran, buku kas umum, serta pengelolaan aset desa. Data dapat dipantau dan dilaporkan secara real-time oleh perangkat desa hingga pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Tampilan antarmuka SISKEUDES versi terbaru menampilkan dashboard ringkasan keuangan desa dengan grafik dan statistik, formulir input anggaran dengan kategorisasi rencana belanja dan pendapatan desa, modul transaksi lengkap dengan riwayat dan filter pencarian, serta menu laporan yang menyediakan preview dan ekspor dokumen ke PDF atau Excel. Pengesahan dan otorisasi data juga ditunjang dengan fitur penguncian data setelah validasi untuk menghindari perubahan sembarangan. Dengan semakin lengkap dan terintegrasinya fitur, SISKEUDES 2.0.7 mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance. Pembaruan ini juga membantu pemerintah desa menghadapi tantangan pengelolaan keuangan digital secara efisien, memastikan pelaporan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung sejak tahun 2017-2018 sebagai upaya pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada awalnya, pengelolaan keuangan desa masih dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi SISKEUDES offline. Sejak tahun 2019, seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo diwajibkan menggunakan SISKEUDES secara online yang terhubung dengan internet sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) aktif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada aparat desa untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem ini.

Meskipun ada kendala seperti keterbatasan SDM, kurang optimalnya bimtek karena jumlah peserta bimtek yang terlalu banyak, serta kendala infrastruktur jaringan internet di beberapa desa, penggunaan SISKEUDES telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa secara signifikan. Penerapan aplikasi ini memudahkan pelaporan keuangan desa secara elektronik dan terintegrasi, sehingga memberikan kemudahan dalam pengawasan dan audit penggunaan dana desa. Desa-desanya di Sidoarjo secara umum sudah mulai beradaptasi dengan sistem ini, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pelatihan dan infrastruktur agar penggunaan SISKEUDES semakin optimal.[9]

Dalam pelaksanaannya Desa Larangan menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang masih beradaptasi dengan aplikasi dan kendala stabilitas jaringan internet yang belum optimal, sehingga sering kali menyebabkan kesulitan dalam mengakses aplikasi. Namun, dengan sosialisasi dan bimbingan teknis rutin dari pemerintah kecamatan serta dukungan dari BPKP, kemampuan pengelola keuangan desa dalam menggunakan SISKEUDES terus berkembang. Data yang dihasilkan meliputi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran, serta laporan keuangan yang tersedia secara real-time. Dengan penerapan SISKEUDES di Desa Larangan, tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin terjaga, mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih modern, efisien, dan sesuai aturan pemerintah.[10]

Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sejak tahun 2017 dengan fase awal penggunaan hybrid, yaitu kombinasi pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SISKEUDES. Pada tahun 2018, desa mulai menggunakan aplikasi SISKEUDES secara offline, dan sejak tahun 2019 seluruh pengelolaan keuangan desa sudah sepenuhnya menggunakan sistem online yang harus terhubung dengan jaringan internet sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa sesuai standar pemerintah. Data yang diolah antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), transaksi keuangan harian, laporan berkala realisasi anggaran, belanja dan penerimaan desa, serta data administrasi pengelola keuangan dan aset desa. Aplikasi ini menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pertanggungjawaban keuangan, pemantauan, dan audit oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten.

Tabel 1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larangan 2025

Uraikan	APBDes 2023	APBDes2025	Perubahan
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	143.000.000,00	185.900.000,00	+30,00%
Pendapatan Transfer	1.971.739.755	2.151.262.547,50	+9,10%
Pendapatan Lain-Lain	45.200.000,00	0,00	-100%
Jumlah Pendapatan	2.160.039.755,00	2.337.162.547,50	+8,20%
BELANJA			
Belanja Pegawai	549.872.500,00	744.472.200,00	+35,38%
Belanja Barang dan Jasa	1.149.534.463,02	1.253.530.900,66	+9,05%
Belanja Modal	448.920.497,16	373.713.181,00	-16,75%
Belanja Tidak Terduga	136.000.000,00	123.800.000,00	-8,97%
Jumlah Belanja /Total APBDes	2.284.327.460,18	2.495.471.281,66	+9,24%
Surplus/(Defisit)	(124.287.705,18)	(158.308.734,16)	+27,36%
Pembiayaan Netto	124.287.705,18	158.308.734,16	+27,36%

Sumber : Diolah dari Peraturan Desa Larangan tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dan 2025.

Berdasarkan Tabel 1, nilai APBDes Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi mengalami perubahan antara tahun 2023 dan tahun 2025. Pada tahun 2023, jumlah pendapatan desa sebesar Rp2.160.039.755,00, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.337.162.547,50. Berdasarkan tabel, jumlah pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,20%. Peningkatan pendapatan terutama terlihat pada Pendapatan Asli Desa yang meningkat sebesar 30,00%, dari Rp143.000.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp185.900.000,00 pada tahun 2025. Sementara itu, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 9,10%, dari Rp1.971.739.755,00 menjadi Rp2.151.262.547,50. Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 100%, yaitu dari Rp45.200.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp0,00 pada tahun 2025.

Pada sisi belanja, jumlah belanja atau total APBDes pada tahun 2023 sebesar Rp2.284.327.460,18, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.495.471.281,66. Berdasarkan tabel, jumlah belanja tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,24%. Peningkatan terbesar terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 35,38%, dari Rp549.872.500,00 pada tahun 2023 menjadi Rp744.472.200,00 pada tahun 2025. Belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar 9,05%, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 16,75% dan belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 8,97%.

Selanjutnya, berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja, pada tahun 2023 terdapat defisit sebesar Rp124.287.705,18, sedangkan pada tahun 2025 defisit meningkat menjadi Rp158.308.734,16. Berdasarkan tabel, perubahan defisit tersebut sebesar 27,36%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah belanja pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah pendapatan. Untuk menutup defisit tersebut, terdapat pembiayaan netto sebesar Rp124.287.705,18 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp158.308.734,16 pada tahun 2025.

Perubahan nilai pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam perencanaan anggaran desa antara tahun 2023 dan 2025. Perubahan tersebut tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai akibat dari penggunaan aplikasi SISKEUDES, karena besarnya pendapatan dan belanja desa dipengaruhi oleh perencanaan, kebutuhan kegiatan, serta kondisi keuangan desa pada masing-masing tahun anggaran. Dalam penelitian ini, SISKEUDES lebih dilihat sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penginputan data, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan.

Jika dikaitkan dengan implementasi SISKEUDES, perubahan APBDes tahun 2023 dan 2025 dapat menjadi gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa selama periode penelitian. SISKEUDES membantu perangkat desa dalam mengelola dan mencatat data keuangan secara lebih terstruktur. Namun, perubahan jumlah pendapatan, belanja, maupun defisit tidak dapat dijadikan bukti bahwa SISKEUDES secara langsung menyebabkan kenaikan atau penurunan anggaran. Dengan demikian, data APBDes dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk melihat perubahan kondisi keuangan Desa Larangan, sedangkan keberhasilan implementasi SISKEUDES dianalisis berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta hasil wawancara dengan perangkat desa.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi e-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Larangan telah mulai menggunakan SISKEUDES sejak tahun 2017, awalnya secara hybrid antara manual (Excel) dan aplikasi, hingga akhirnya pada tahun 2019 penggunaan sudah sepenuhnya online. Namun, penelitian tersebut

mengungkap beberapa kendala utama dalam sistem adaptasi ini. Pertama, sumber daya manusia (SDM) di desa belum sepenuhnya mampu beradaptasi dan mengoperasikan aplikasi dengan baik meskipun sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang diberikan sering dianggap kurang efektif karena dilakukan secara massal dengan banyak peserta sehingga materi kurang bisa diserap secara optimal. Kedua, kendala sarana, terutama jaringan internet, menjadi kendala signifikan. Jaringan internet desa yang digunakan bersama untuk berbagai kebutuhan kantor seringkali lambat sehingga aplikasi SISKEUDES mengalami error dan tidak berjalan stabil. [11].

Penelitian terdahulu mengenai implementasi e-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mulai menggunakan SISKEUDES sejak tahun 2017, dengan proses transisi dari sistem manual berbasis Excel ke aplikasi online sepenuhnya pada tahun 2019. Namun, dalam pelaksanaannya, dua kendala utama ditemukan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan adaptasi SDM terhadap teknologi dan ketersediaan sarana pendukung menjadi faktor penting untuk keberhasilan e-Government di tingkat desa, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan teknologi menjadi fokus utama perbaikan ke depan.

Selain itu, penelitian Isnaini Rodiyah dalam studi berjudul “The Effectiveness of the Government to Government Model Through SISKEUDES” menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai pendukung utama dalam implementasi SISKEUDES. Penelitian lain yang relevan adalah oleh (Kusnadi, 2024) yang membahas efektivitas sistem keuangan desa berbasis digital di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun aplikasi SISKEUDES telah memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, keberhasilan penerapannya masih sangat bergantung pada kesiapan SDM di desa dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. [12].

Hal ini menunjukkan bahwa desa masih belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan secara digital. Penelitian juga menekankan bahwa kemampuan adaptasi menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi e-Government ini, mencakup adaptasi SDM terhadap kemajuan teknologi dan efektivitas pemanfaatan aplikasi dalam proses tata kelola keuangan desa. Meski ada hambatan, upaya penyesuaian terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai desa dalam penggunaan SISKEUDES. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan e-Government melalui SISKEUDES di Desa Larangan telah membawa kemajuan positif dalam pengelolaan keuangan desa, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi terutama jaringan internet untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) memandang implementasi sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi beberapa faktor penting yang harus berjalan simultan agar kebijakan dapat berhasil diterapkan. Edwards mengidentifikasi empat variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi mencakup penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan efektif kepada para pelaksana dan pihak terkait agar semua memahami tujuan dan mekanisme kebijakan. Kedua, sumber daya merujuk pada ketersediaan dana, tenaga kerja, dan sarana lain yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana memainkan peran penting karena keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan, niat, dan sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan. Keempat, struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi tempat pelaksanaan berlangsung, yang dapat memperlambat atau mempermudah proses implementasi tergantung pada aturan, prosedur, dan koordinasi internal yang ada. Keempat, faktor ini saling berinteraksi dan harus dikelola secara bersamaan agar pelaksanaan kebijakan tidak mengalami hambatan. Edwards menekankan bahwa walaupun pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki niat serta sumber daya, struktur birokrasi yang buruk tetap bisa menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami tantangan dan syarat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil observasi Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mulai menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam proses pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 namun masih dengan 2 cara yaitu secara manual melalui Microsoft Excel dan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kemudian pada tahun 2018 sudah terus menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tetapi aplikasi masih dapat digunakan secara offline tanpa harus terhubung koneksi internet, dan mulai tahun 2019 hingga saat ini seluruh pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dalam pengoperasiannya sudah harus online atau terhubung koneksi internet. Penggunaan SISKEUDES ini berkaitan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). [13].

Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan Sistem Keuangan Desa namun melalui observasi yang dilakukan wawancara dengan kepala urusan keuangan didapatkan informasi bahwa masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama ialah sumber daya manusia (SDM) selaku pelaksana kegiatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) belum mampu beradaptasi sepenuhnya, yang mana walaupun sudah didapatkan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang dalam 1 tahun dilakukan 2 hingga 3 kali

tetapi penjelasan yang diberikan dirasa belum cukup jelas dan detail sehingga pelaksana kegiatan Sistem Keuangan Desa. Kedua, masalah sarana terutama pada jaringan internet masih menjadi hambatan utama. Koneksi internet yang lambat dan tidak stabil sering menyebabkan aplikasi SISKEUDES mengalami error atau tidak terdeteksi, mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan secara digital. Meski terdapat hambatan tersebut, Pemerintah Desa Larangan terus berupaya meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap sistem digital ini karena pengelolaan keuangan desa yang efisien dan transparan melalui SISKEUDES merupakan amanat aturan dan penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta pengawasan dana desa. Secara garis besar, pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan menunjukkan progres positif dalam transisi pengelolaan keuangan dari manual ke sistem elektronik dengan tantangan utama pada kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi yang perlu diperbaiki agar efektivitas sistem dapat optimal.

Di Desa Larangan masih belum mengerti sepenuhnya mengenai cara mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Meski demikian, pelatihan diberikan secara massal kepada banyak peserta sehingga materi sulit terserap secara optimal, mengakibatkan penguasaan aplikasi oleh beberapa pegawai belum maksimal. Terkait laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES, Desa Larangan mampu mencatat pemasukan dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa; sekaligus mencatat pengeluaran untuk belanja operasional, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara digital dan real-time. Aplikasi juga digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang terstruktur dan terintegrasi. Data ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang mempengaruhi Implementasi E government tersebut. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama. Sebagian besar aparat desa yang menjadi pelaksana aplikasi SISKEUDES belum sepenuhnya menguasai dan mampu beradaptasi dengan teknologi ini, meskipun telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Pelatihan yang dilakukan secara massal seringkali kurang mendalam dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik operator desa, sehingga pemahaman dan penguasaan sistem masih belum optimal. Kedua, masalah infrastruktur teknologi berupa jaringan internet yang kurang memadai dan sering tidak stabil sangat menghambat proses pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Koneksi internet yang lambat dan sering terputus menyebabkan aplikasi mengalami error atau gagal dalam sinkronisasi data, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan desa secara digital. Ketiga, keterbatasan jumlah petugas yang benar-benar menguasai aplikasi SISKEUDES menimbulkan beban kerja yang berlebih pada operator yang ada. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi, mengingat teknologi merupakan prasyarat keberhasilan penggunaan sistem keuangan digital tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi. Meskipun telah ada bimbingan teknis (bimtek) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPKP yang rutin diselenggarakan beberapa kali setahun, SDM yang mengoperasikan aplikasi ini masih belum sepenuhnya menguasai penggunaannya karena banyaknya peserta bimtek sehingga akses materi kurang optimal. Selain itu, jaringan internet yang tersedia di desa relatif lambat dan tidak stabil, sehingga sering menyebabkan aplikasi error dan tidak bisa dijalankan dengan lancar. Dari data yang ada di aplikasi SISKEUDES, laporan keuangan desa Larangan mencakup realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang rutin dibuat tiap triwulan atau tahunan. Berdasarkan paparan latar belakang dapat diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi E-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Pendekatan untuk penelitian ini merupakan Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Heeks, R. (2001). Penelitian kualitatif adalah Suatu pendekatan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta interaksi para subjek. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Larangan kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam implementasi SISKEUDES. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, operator SISKEUDES, serta staf pengelola keuangan desa yang berperan aktif dalam penggunaan sistem tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung. Wawancara bertujuan untuk mengungkap informasi lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan subjek terhadap implementasi SISKEUDES. Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat penerapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di desa.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap pertama, pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap kedua, reduksi data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pemusatan perhatian pada data yang paling penting agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Pada tahap ketiga, penyajian data, data yang telah direduksi diorganisasikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram yang memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan dalam data. Tahap terakhir adalah kesimpulan atau verifikasi, dimana peneliti menginterpretasikan makna data yang telah disajikan dan melakukan pengecekan konsistensi data melalui berbagai teknik seperti triangulasi, untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Government melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan desa secara digital. Implementasi aplikasi ini tidak hanya menjadi wujud aktualisasi penggunaan teknologi dalam sektor publik tetapi juga mendukung proses reformasi izin dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan anggaran desa. Melalui digitalisasi proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah desa mampu meminimalisir potensi kesalahan dan manipulasi data yang selama ini rawan terjadi pada sistem manual. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah desa, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi laporan keuangan desa secara lebih terbuka. Namun demikian, keberhasilan penerapan SISKEUDES di Desa Larangan masih dihadapkan pada tantangan yang cukup krusial, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Keterbatasan kompetensi operator dalam mengelola aplikasi serta terbatasnya pelatihan yang diberikan masih menjadi kendala utama. Selain itu, permasalahan terkait stabilitas jaringan internet di wilayah pedesaan juga cukup mempengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES secara penuh. Hal ini menandakan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan serta dukungan penguatan infrastruktur teknologi agar optimalisasi penerapan dapat terwujud.

A. Komunikasi Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Komunikasi dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan dilakukan melalui koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staff Operator SISKEUDES, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Operator SISKEUDES Desa Larangan, pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif karena jumlah peserta dalam satu sesi cukup banyak sehingga penyampaian materi belum dapat dipahami secara optimal oleh seluruh peserta. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES belum merata sehingga hanya beberapa perangkat desa, terutama operator, yang memahami penggunaan aplikasi secara lebih mendalam. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Larangan, komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan dengan baik melalui musyawarah desa. Dalam proses penyusunan APBDes maupun pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Situasi ini menyebabkan komunikasi di dalam desa cenderung bersifat informal dan terfokus pada individu tertentu, sehingga transfer pengetahuan tidak merata. Di samping itu, komunikasi vertikal dengan lembaga terkait seperti BPD sudah dilakukan melalui musyawarah desa untuk menyusun APBDes, namun pelaksanaan teknis SISKEUDES tetap mengalami tantangan, khususnya dalam hal pemahaman dan penyesuaian terhadap teknologi. Interpretasi dari hasil yang ada menunjukkan bahwa pola komunikasi yang berlangsung mencakup aspek vertikal dan horizontal, tetapi masih belum sepenuhnya efisien karena adanya batasan seperti kurangnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan fasilitas pendukung. Kelemahan dalam penyampaian serta pemahaman materi pelatihan berdampak pada kesiapan pelaksana untuk menggunakan aplikasi, yang selanjutnya memengaruhi kelancaran pelaksanaan SISKEUDES.

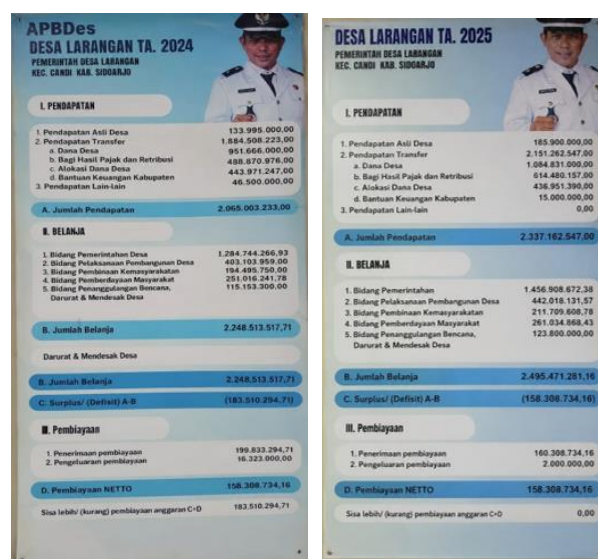
Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih interaktif dan pelatihan yang terfokus agar semua aparat desa dapat memahami sistem dengan baik serta memanfaatkan teknologi yang cukup. Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan sangat tergantung pada efektivitas komunikasi antara para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Menurut George C. Edwards III (1980), komunikasi menjadi elemen vital dalam proses penerapan kebijakan publik karena melalui komunikasi, pesan dan instruksi dari kebijakan dapat disampaikan, dipahami, dan diterapkan dengan benar oleh pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Larangan, informan menyampaikan bahwa: “Sebenarnya menurut saya dengan adanya sistem siskeudes ini sangat membantu dalam mengelola keuangan dan menginput data sejak awal penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan, yaitu pada tahun 2018, penggunaan sistem ini semakin memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan input data. Meskipun ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti

pemahaman fitur baru dan keterbatasan jaringan internet, secara keseluruhan aplikasi ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi administrasi desa hingga saat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Operator SISKEUDES Desa Larangan, informan menjelaskan bahwa: “Sejak sebelum adanya aplikasi SISKEUDES, kami mengalami banyak kendala dan kesulitan dalam menginput data keuangan desa karena masih menggunakan metode manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Misalnya, bagi kaur perencanaan dan bendahara desa, ketika ada pembaruan fitur, kami harus belajar secara mandiri menggunakan tutorial di YouTube dan, jika masih ada yang kurang jelas, kami mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan bantuan.”

Oleh karena itu, pelatihan dan komunikasi yang berkesinambungan sangat penting agar seluruh aparat desa dapat memahami sistem dengan baik dan mampu memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Selanjutnya, teori komunikasi organisasi menekankan pentingnya adanya komunikasi yang jelas, konsisten, dan dua arah agar informasi bisa mengalir dengan baik, sehingga memudahkan adaptasi terhadap perubahan, termasuk adopsi teknologi baru seperti SISKEUDES. (Robbins & Judge, 2013). Penelitian sebelumnya mengenai penerapan SISKEUDES juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik di antara para pemangku kepentingan dan pelatihan yang tepat merupakan faktor kunci keberhasilan penggunaan aplikasi tersebut di tingkat desa. (Ramadhan, 2021).



Gambar 2 APBDes Siskeudes Desa Larangan tahun 2024 dan 2025
Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2025.

Berdasarkan gambar 2 dan 3, menunjukkan infografis APBDes Desa Larangan Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang disusun melalui aplikasi SISKEUDES. Infografis tersebut memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, terjadi peningkatan pendapatan dan belanja desa pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, sementara defisit anggaran menurun, sehingga menunjukkan adanya pengelolaan keuangan desa yang semakin baik dan akuntabel melalui penerapan SISKEUDES.

Perbandingan APBDes Desa Larangan tahun 2024 dan 2025 tersebut menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam menyusun, menginput, dan menyajikan data keuangan secara lebih terstruktur. Pada tahun 2025, pendapatan desa meningkat dibandingkan tahun 2024, sedangkan defisit anggaran mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan perencanaan dan pencatatan yang lebih tertata melalui SISKEUDES. Selain itu, penyajian informasi APBDes dalam bentuk infografis juga memudahkan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Larangan.

Penggunaan SISKEUDES juga dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pencatatan yang lebih sistematis, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah untuk ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Hal ini memperlihatkan bahwa SISKEUDES tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memasukkan data keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan desa yang mendukung ketertiban administrasi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.

Tabel 2 Laporan Pendapatan Desa Larangan 2024

No	Keterangan	Nomial (RP)
I	PENDAPATAN	
1.	Pendapatan Asli Desa	133.985.000,00
2.	Pendapatan Tranfer	1.884.508.223,00
	Dana Desa	951.666.000,00
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	488.870.976,00
	Alokasi Dana Desa	443.971.247,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00
3.	Pendapatan Lain-Lain	46.500.000,00
A.	Jumlah Pendapatan	2.065.003.233,00
II	BELANJA	
1.	Bidang Pemerintah Desa	1.284.744.268,93
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	403.103.959,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	194.495.750,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.061.241,78
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa	215.018.298,00
B.	Jumlah Belanja	2.248.518.517,71
C.	Surplus/ (defisit) A-B	183.510.294,71
III	PEMBIAYAAN	
1.	Penerima Pembiayaan	198.833.294,71
2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.323.000,00
D.	Pembiayaan NETTO	158.308.734,16
	Sisa lebih/ (Kurang) pembiayaan anggaran C+D	183.510.294,71

Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Larangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 Laporan Pendapatan dan Belanja Desa Larangan Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa total pendapatan desa sebesar Rp2.065.003.233,00, sedangkan total belanja mencapai Rp2.248.518.517,71, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp183.510.294,71. Kondisi tersebut kemudian didukung oleh mekanisme pembiayaan desa sesuai dengan perencanaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antarperangkat desa agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penginputan, hingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, temuan penelitian ini pada dasarnya sesuai dengan konsep komunikasi yang menekankan pentingnya penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terlihat dari adanya koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Operator SISKEUDES, dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa, rapat koordinasi, serta penyampaian informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kendala dalam pemahaman terhadap perubahan atau pembaruan dalam aplikasi SISKEUDES.

Adanya defisit anggaran pada tahun 2024 tidak dapat secara langsung diartikan sebagai akibat dari lemahnya komunikasi, karena data yang tersedia hanya menunjukkan kondisi perencanaan pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data APBDes digunakan sebagai gambaran kondisi pengelolaan keuangan desa, sedangkan hubungan dengan implementasi SISKEUDES dilihat dari bagaimana komunikasi dan koordinasi antarperangkat desa mendukung proses pengelolaan keuangan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SISKEUDES di Desa Larangan telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori George C. Edwards III, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyampaian informasi, koordinasi, dan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

B. Sumber Daya Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah ketersediaan dan kapasitas sumber daya organisasi. Sumber daya ini meliputi tenaga manusia, sarana prasarana, teknologi, serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, suatu kebijakan cenderung sulit berjalan optimal meskipun perencanaan telah dilakukan dengan baik. Di Desa Larangan Kecamatan Candi, yang menjadi lokasi penelitian, tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berperan penting sebagai perangkat pendukung serta kapasitas dalam mencapai prinsip good governance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Larangan, Ibu Nurul Rohmah, diperoleh informasi bahwa: “Tenaga kerja merupakan masalah utama karena hanya ada satu operator yang benar-benar mengerti cara menggunakan aplikasi SISKEUDES, sehingga keberlanjutan pengelolaan keuangan desa sangat tergantung pada orang tersebut. Selain itu, fasilitas seperti koneksi internet dengan kecepatan 50 Mbps digunakan secara bersama oleh seluruh aktivitas kantor, yang mengakibatkan akses seringkali lambat dan aplikasi SISKEUDES sering mengalami masalah (error).”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi SISKEUDES masih menghadapi kendala, terutama dari sisi keterbatasan tenaga yang memiliki pemahaman teknis dan fasilitas jaringan internet. Ketergantungan pada satu operator yang lebih memahami aplikasi dapat menjadi kendala apabila operator tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya. Selain itu, penggunaan jaringan internet secara bersama untuk aktivitas kantor dapat memengaruhi kelancaran proses penginputan data melalui aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Larangan, informan juga menyampaikan bahwa: “Sumber daya manusia di pemerintahan desa pada dasarnya sudah cukup mampu dalam mengelola aplikasi SISKEUDES. Memang, tidak semua pegawai memahami aspek teknisnya secara mendalam, namun kami terus berusaha belajar dan saling membantu agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah desa juga secara aktif mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Menurut kami, dari sisi sumber daya manusia sudah terdapat komitmen dan upaya yang baik untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kemampuan teknis perangkat desa belum merata, terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran, kerja sama, pelatihan, dan bimbingan teknis. Dengan demikian, keterbatasan kemampuan teknis tidak sepenuhnya menghambat pelaksanaan SISKEUDES karena perangkat desa berupaya saling membantu dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Bimbingan teknis (Bimtek) dari pemerintah daerah melalui BPKP diakui belum berjalan dengan baik karena dilaksanakan secara masal dengan banyak peserta, sehingga fokus dan pemahaman peserta menjadi tidak maksimal. Narasumber mengungkapkan bahwa meskipun pelatihan dan fasilitas sudah disediakan, masih terdapat jurang kemampuan dalam adaptasi SDM dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan teknologi aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Operator SISKEUDES Desa Larangan, informan menyampaikan bahwa: “Menurut saya, sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES. Meskipun aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan pengelolaan keuangan desa karena tampilannya yang sederhana, keberhasilan penggunaannya tetap bergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikannya. Namun, kendala utama yang sering kami hadapi adalah jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses penginputan data sering terlambat dan tidak lancar. Selain itu, terkadang aplikasi SISKEUDES juga mengalami gangguan (error) yang memengaruhi kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, kami berharap adanya peningkatan fasilitas pendukung, khususnya jaringan internet yang lebih stabil, serta pelatihan bagi perangkat desa agar penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan SISKEUDES. Dari sisi sumber daya manusia, perangkat desa telah berupaya meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran dan pelatihan, meskipun pemahaman teknis belum merata. Dari sisi sarana pendukung, jaringan internet yang kurang stabil dan gangguan pada aplikasi masih menjadi kendala dalam proses penginputan dan pengelolaan data keuangan desa.

Berdasarkan data pendidikan terakhir sumber daya manusia di kantor pemerintahan Desa Larangan, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 3 Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Larangan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Agus Siswanto, S. P.	Kepala Desa	S1
2.	Achmad Solifudin, A.Md.Kom.	Plt. Sekretaris Desa & Kaur Perencanaan	D3
3.	Sunikah	Kaur Tata Usaha Dan Umum	SLTA
4.	Nurul Rohmah, S. Pd.	Kaur Keuangan	S1
5.	Ir. Anwari	Kasi Kesra	S1
6.	Dewi Eko Arisanti, A.Md.Kep.	Kaur Pemerintahan	D3
7.	Abdul Wachid	Kasi Pelayanan	SLTA
8.	Astridya Rasetian Putri	Kasun Larangan Barat	SLTA
9.	Jarwo Edy Wibowo	Kasun Larangan Timur	SLTA

Sumber : Data Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Larangan (2026)

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa perangkat Desa Larangan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Terdapat 3 perangkat desa dengan pendidikan terakhir jenjang Sarjana (S1), 2 perangkat desa dengan pendidikan Diploma (D3), dan 4 perangkat desa dengan pendidikan terakhir SLTA. Keragaman latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES, khususnya dalam hal kemampuan teknis penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis diperlukan untuk mendukung kemampuan perangkat desa dalam mengoptimalkan implementasi SISKEUDES. Sumber daya yang diperlukan dalam penerapan SISKEUDES di Desa Larangan meliputi sumber daya manusia, fasilitas teknologi, serta bimbingan teknis.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi SISKEUDES di Desa Larangan belum sepenuhnya memadai, meskipun perangkat desa telah berupaya meningkatkan kemampuan dan mendukung pelaksanaan aplikasi. Hal tersebut terlihat dari adanya ketergantungan pada satu operator yang lebih memahami penggunaan aplikasi, belum meratanya pemahaman teknis perangkat desa, serta masih adanya kendala jaringan internet dan gangguan pada aplikasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan SISKEUDES, terutama dalam proses penginputan dan pengelolaan data keuangan desa.

Jika dibandingkan dengan teori George C. Edwards III (1980), hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menempatkan sumber daya sebagai salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian ini, sumber daya terlihat dari kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan SISKEUDES serta tersedianya fasilitas pendukung berupa jaringan internet. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya tersebut belum sepenuhnya memadai karena kemampuan teknis perangkat desa belum merata dan jaringan internet masih mengalami kendala. Dengan demikian, implementasi SISKEUDES di Desa Larangan sesuai dengan teori Edwards III dalam hal pentingnya sumber daya, tetapi kondisi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan secara optimal.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh konsep Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi yang menekankan pentingnya tenaga kerja yang kompeten, fasilitas teknologi yang memadai, dan pelatihan yang berkelanjutan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik (Laudon & Laudon, 2016). Selain itu, Rogers (2003) menjelaskan bahwa

keberhasilan penggunaan teknologi berkaitan dengan kesiapan pengguna dan ketersediaan sumber daya pendukung. Penelitian Wibowo et al. (2020) juga menekankan pentingnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai dalam mendukung pemahaman dan penggunaan SISKEUDES. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih terarah serta peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi SISKEUDES di Desa Larangan belum sepenuhnya memadai, meskipun telah terdapat upaya dari perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan dan mendukung pelaksanaan aplikasi. Hal tersebut terlihat dari adanya ketergantungan terhadap satu operator yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai aplikasi, keterbatasan pemahaman teknis sebagian perangkat desa, serta kendala jaringan internet dan gangguan aplikasi.

Penguatan teori dapat ditemui dalam konsep Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi yang menekankan pentingnya kerjasama antara tenaga kerja yang kompeten, fasilitas teknologi yang tepat, serta pelatihan yang berkelanjutan agar suatu sistem informasi dapat berfungsi dengan baik (Laudon & Laudon, 2016). Di samping itu, menurut teori adaptasi teknologi dari Rogers (2003), keberhasilan penggunaan teknologi ditentukan oleh kesiapan pengguna dan ketersediaan sumber daya pendukung yang cukup. Penelitian sebelumnya juga menekankan perlunya pelatihan yang mendalam dan infrastruktur yang handal agar SDM dapat memahami aplikasi seperti SISKEUDES secara menyeluruh dan aplikatif (Wibowo et al., 2020). Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas fasilitas teknologi, termasuk kecepatan dan stabilitas koneksi internet, menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan SISKEUDES yang berkelanjutan di Desa Larangan.

C. Disposisi Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Disposisi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan menggambarkan sikap, komitmen, serta tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi tersebut. Sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kesediaan perangkat desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mendukung penggunaan aplikasi SISKEUDES, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Larangan, informan menyampaikan bahwa: *"Menurut saya, pembagian tugas dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Larangan sudah cukup jelas. Setiap perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kami juga berupaya agar pengelolaan aplikasi tidak hanya bergantung pada satu orang, sehingga apabila ada perangkat desa yang berhalangan atau mengalami kendala teknis, masih ada perangkat lain yang dapat membantu. Selain itu,*

komunikasi dan koordinasi antarperangkat desa terus dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES dapat berjalan dengan baik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian tugas yang jelas serta komunikasi dan koordinasi antarperangkat desa menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mendukung implementasi aplikasi SISKEUDES. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat berlangsung secara efektif. Analisis atas temuan ini menunjukkan bahwa disposisi pengelola SISKEUDES di Desa Larangan secara umum sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan motivasi individu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Disposisi yang positif akan mendorong pelaksana untuk bekerja secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Operator SISKEUDES Desa Larangan, informan menjelaskan bahwa: *"Menurut saya, keberadaan aplikasi SISKEUDES sangat membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan desa karena sistemnya sederhana dan mudah dipahami. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, kami tetap berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Kami juga terus belajar secara mandiri, memanfaatkan bimbingan dari pihak kecamatan, serta saling berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya agar penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan dengan baik. Bagi kami, komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Staff Operator SISKEUDES memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi serta berupaya menyelesaikan setiap kendala yang dihadapi melalui pembelajaran mandiri, koordinasi dengan perangkat desa, dan dukungan dari pihak kecamatan. Sikap tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab, komitmen, dan kemauan untuk terus beradaptasi dalam mendukung implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan.

Penelitian terdahulu oleh Choiriyah, I.U., Sabilillah, S.F., dan Riyadh, A. (2022) juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SISKEUDES dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, dukungan pimpinan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat turut memperkuat disposisi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di Desa Larangan telah mendukung implementasi aplikasi SISKEUDES, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, koordinasi yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di Desa Larangan telah mendukung implementasi aplikasi SISKEUDES, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, koordinasi yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antarperangkat desa dalam mengelola aplikasi SISKEUDES. Pembagian tugas tersebut diperlukan agar setiap perangkat desa mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman yang sama dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Larangan, informan menjelaskan bahwa: *"Menurut saya, pembagian tugas dalam penggunaan SISKEUDES sudah cukup jelas. Masing-masing perangkat desa sudah mempunyai tugasnya sendiri, seperti sekretaris, kaur perencanaan, dan kaur keuangan. Untuk penggunaan aplikasinya juga tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi perangkat desa lainnya tetap ikut membantu apabila ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Jadi, kami saling berkoordinasi supaya pengelolaan keuangan desa tetap berjalan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan SISKEUDES di Desa Larangan sudah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing perangkat desa. Pemerintah desa juga berupaya agar pengelolaan aplikasi tidak hanya bergantung pada satu orang melalui keterlibatan beberapa perangkat desa. Koordinasi antarperangkat desa dilakukan untuk membantu kelancaran pengelolaan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Larangan, masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknis aplikasi. Informan menjelaskan bahwa: *"Kalau untuk pemahaman aplikasi, belum semuanya memahami secara mendalam. Yang paling memahami memang operator SISKEUDES karena lebih sering menggunakan aplikasinya. Kami yang lain tetap mengetahui dan ikut membantu sesuai tugas masing-masing. Kalau ada kendala dalam penggunaan aplikasi, biasanya kami koordinasi dengan operator atau meminta bantuan dari pihak kecamatan. Jadi memang masih ada ketergantungan pada operator."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun pembagian tugas telah dilakukan, masih terdapat ketergantungan pada operator tertentu dalam pelaksanaan teknis SISKEUDES. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan apabila operator berhalangan, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman teknis bagi perangkat desa lainnya.

Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Agar struktur birokrasi berfungsi dengan baik, diperlukan pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang mencukupi, dan SDM yang mumpuni agar pelaksanaan sistem seperti SISKEUDES dapat berjalan dengan efisien. Kelemahan dalam struktur birokrasi, terutama penumpukan tanggung jawab pada sejumlah kecil orang dan kurangnya pelatihan yang merata, dapat menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Efektivitas dan keberlanjutan implementasi Siskeudes di Desa Larangan dapat ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan mengatasi distribusi tugas yang gagal untuk meningkatkan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi Siskeudes menurut indikator George C. Edwards III merujuk pada salah satu dari empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, bersama komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Struktur birokrasi berkaitan dengan pola hubungan, pembagian tugas, wewenang, serta mekanisme kerja yang sudah diatur secara jelas dan baku dalam organisasi pelaksana kebijakan, dalam hal ini pemerintah desa. Struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, pembagian wewenang yang tegas, dan tanggung jawab yang didistribusikan secara adil pada seluruh pelaksana aplikasi Siskeudes.

Dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes, struktur birokrasi yang baik akan mendorong proses pelaporan, penatausahaan, hingga akuntabilitas keuangan desa berjalan lebih efisien dan transparan. Namun, jika struktur birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya terjadi rangkap jabatan operator atau SOP tidak dilaksanakan dengan konsisten, maka kendala implementasi seringkali muncul, seperti kebingungan tugas, pengelolaan data yang lambat, atau konflik kewenangan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan struktur birokrasi sangat penting agar implementasi aplikasi Siskeudes dapat mencapai tujuan, yaitu tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.



Gambar 4 SOP Implementasi Siskeudes Di Desa Larangan

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, 2025

Diagram diatas menggambarkan alur proses Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) itu sendiri. Proses implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Larangan berlangsung secara terstruktur dan sistematis mulai dari tahap persiapan dan pelatihan operator, perencanaan anggaran desa, penginputan data keuangan dengan bukti pendukung, verifikasi dan validasi data, hingga penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan dan dibahas dalam musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diikuti oleh tahap pengawasan dan evaluasi secara berkala. Setiap tahapan ini saling terkait dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan aplikasi Siskeudes sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan SOP, kecermatan input data, serta ketersediaan sumber daya teknis dan SDM yang kompeten. Dengan demikian, penerapan SOP ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.



Gambar 5 Struktur Birokrasi Desa Larangan
 Sumber : Website Resmi Pemerintah Desa Larangan, 2026

Struktur organisasi dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Desa Larangan, menurut indikator George C. Edwards III, adalah aspek krusial yang menjamin adanya koordinasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Edwards III menegaskan bahwa struktur organisasi harus dibentuk dengan hierarki yang jelas dan pembagian tugas yang tegas, sehingga implementasi kebijakan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di Desa Larangan, hal ini terlihat dari pengaturan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa seperti Kaur Keuangan, yang bertindak langsung sebagai pelaksana teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kaur Keuangan memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam administrasi keuangan desa, sedangkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa bertindak sebagai pengarah dan pengawas.

Penelitian di Desa Larangan menunjukkan bahwa walaupun organisasi sudah sesuai dengan prinsip birokrasi yang diatur, ada tantangan dalam komunikasi internal dan kapasitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan agar pelaksanaan Siskeudes dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dalam kebijakan keuangan desa. Dengan demikian, struktur birokrasi di Desa Larangan telah memenuhi prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh George C. Edwards III, terutama terkait dengan koordinasi, hierarki, dan akuntabilitas untuk mendukung pelaksanaan Siskeudes dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan dapat dikatakan telah berjalan dan secara umum sesuai dengan teori George C. Edwards III, terutama dalam hal pembagian tugas, koordinasi, hierarki, dan tanggung jawab antarperangkat desa. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, operator SISKEUDES, serta perangkat desa lainnya dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Meskipun pembagian tugas telah dilakukan, masih terdapat ketergantungan pada satu operator yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai aplikasi SISKEUDES. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan apabila operator berhalangan hadir, karena tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan teknis yang sama dalam mengoperasikan aplikasi.

Jika dibandingkan dengan teori George C. Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori dalam hal pentingnya struktur birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pembagian tugas dan koordinasi yang terdapat di Desa Larangan telah mendukung pelaksanaan SISKEUDES. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketergantungan pada operator tertentu. Dengan demikian, kesesuaian dengan teori terlihat pada keberadaan struktur, pembagian tugas, dan koordinasi, sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah pemerataan kemampuan teknis dan pembagian pengetahuan antarperangkat desa.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan dapat dikatakan sesuai dengan teori George C. Edwards III, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi yang telah ada perlu didukung dengan pemerataan kemampuan perangkat desa agar tugas pengelolaan SISKEUDES tidak terlalu bergantung pada satu operator. Peningkatan kapasitas perangkat desa, pembagian pengetahuan mengenai

penggunaan aplikasi, serta koordinasi yang berkelanjutan dapat membantu memperkuat struktur birokrasi dalam pelaksanaan SISKEUDES.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, struktur birokrasi di Desa Larangan telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aplikasi SISKEUDES melalui pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme kerja yang telah berjalan. Namun, masih terdapat kendala pada pemerataan kemampuan teknis perangkat desa. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi tidak hanya dilakukan melalui pembagian tugas secara formal, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan setiap perangkat desa agar dapat saling menggantikan dan membantu apabila terjadi kendala dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Dengan kondisi tersebut, implementasi SISKEUDES di Desa Larangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

VII. SIMPULAN

Penelitian ini tentang pengelolaan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bagian dari e-Government di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Digitalisasi proses keuangan melalui aplikasi ini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mempercepat pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, keberhasilan implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan komunikasi yang efektif. Menurut teori George C. Edwards III (1980) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh empat elemen utama. Komunikasi yang efektif memastikan perangkat desa memahami tujuan dan prosedur pengelolaan keuangan secara digital, sehingga menghindari miskomunikasi. Sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi, anggaran, dan kemampuan SDM melalui pelatihan, sangat penting untuk mendukung kelancaran penggunaan aplikasi ini. Disposisi atau sikap dan motivasi aparat desa, seperti penerimaan dan komitmen terhadap perubahan digital, menjadi faktor utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi memfasilitasi koordinasi antar perangkat desa dan instansi terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi dapat berjalan efektif. Dengan sinergi keempat elemen ini, implementasi SISKEUDES dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Larangan atas keterbukaan akses informasi selama penulis melakukan penelitian, kepada dosen pembimbing yang sudah sabar memberikan arahan yang diberikan ke penulis, serta kepada dosen penguji atas masukannya sehingga memperkaya tulisan artikel ini. Terima kasih kepada orangtua atas doa dan dukungannya, kepada teman-teman mahasiswa atas kebersamaannya.

REFERENSI

- [1] Muksin, A., & Treesje Runtu, CVD (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* , 6 (2), 1281-1296.
- [2] Aprianty, DR (2016). Implementasi kebijakan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. *J. Ilmu Pemerintahan.* , 4 (4), 1593.
- [3] "Wijaya, A. & Saleh, M.,". *Electronic-Based Government System (SPBE) in Realizing the Principles of Good Governance in Regional Government.* , vol. 5(3), no. 2154-2164, 2025.
- [4] "Fristanti,W.D., & Choiriyah,l .U.,". *The Effectiveness of the Village Financial System (SISKEUDES) in Developing Government to Government (G2G) in Dukuhsari Village, Jabon District, Sidoarjo Regency.* , vol. 14(1), no. 12-29, 2025.
- [5] "Laili, N., Sa'diyah, K., & kebabu,E.,". *Implementation of the Village Financial System in the Financial Management of Pelemwatu Village*, vol. 1(2), no. 147-152, 2022.
- [6] "Rahmawati, M. A., Krisnawati, A., Nadzah,S., Widiyanti,N.P., & Utomo, H.A.R," *Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) as an Effort to Improve Village Financial Accountability in Tebel Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency.* , vol. 4(2), no. 197-210, 2024.

- [7] "Kadek Ginanthi Asih¹, I. M.P.A,"). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) VERSION 2.0.3 IN IMPROVING THE QUALITY OF VILLAGE FINANCIAL ACCOUNTABILITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Study in Kalibukbuk Village, Buleleng District, Bali). , vol. 13(1), no. 2614-1930, 2022.
- [8] "Nadaa, D., Priyanti, E., Mukti, D. K., Desa, K., Bidang, K., & Desa, P.," Digital Innovation in the Implementation of SISKEUDES Application, vol. 7, no. 61-73, 2023.
- [9] "Community and Village Empowerment Service, K. DI, Umagapi, S., & Suherman, U.," Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) Application in Management., vol. 18, no. 138-145, 2025.
- [10] "Zuliaty, F., Sayrani, L. P., Andaya, M. N. D., & Rene, M. O.," Effectiveness of System Applications, 2025.
- [11] "Choiriyah,I.,U Sabililah, S. F., & Riyadh, A.," Adaptability of the Village Financial System (Siskeudes) in Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency, vol. 12(1), no. 156-166, 2022.
- [12] "Choiriyah,I.,U U.B.A.R., & Sukma, H.," The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES. , vol. 11 (1), no. 48-56, 2023.
- [13] "Maknun, L., Ayu, I., Fadhillah, N., & Munir, S.," Analysis of the Implementation of the Covid-19 Village Financial System Application., vol. 3(4), no. 12-23, 2025.
- [14] "Heeks,R," Understanding e-government for development, 2001.
- [15] "Ramadhan, K. R., & Priyanti, E.," Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Telukjambe Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency., vol. 6(3), no. 10483-10495, 2022.
- [16] "Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A.," Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) 2.0 in Guru Agung 1 Village, North Kaur District, Kaur Regency, vol. 2(2), no. 152-165, 2020.
- [17] "Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H.," Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (Apbdes) in Kodon-Kodon Village, Merek District, Karo Regency, vol. 11(3), no. 1209-1218, 2022.
- [18] R. Heeks, memahami e - government untuk pembangunan , 2001 .
- [19] P. A. & M. H. M. Pratiwi, analisis penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa , 2025 .
- [20] K. C. & L. J. P. Laudon, "managing the digital firm," management information , 2016.
- [21] "Aprianty, D.R.," Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, vol. 1593, p. 4(4), 2016.
- [22] "Choiriyah,I. U., U,B,A.R.,& Sukma, H.," The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES., vol. 11(1), no. 48-56, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.